

**ANALISIS PERAN STRATEGIS DAN POSISI INDONESIA DALAM PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA (PBB): KONTRIBUSI, TANTANGAN, DAN DIPLOMASI DI ERA
GLOBAL**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi

Dosen Pengampu: Prof. Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D



Disusun oleh:

Intan Puspitasari	2316041037
Niken Puspita Sari	2316041044
Septiyan Dwi Amanda	2316041045
Nindya Soraya Maharani	2316041050
Aliya Khairunnisa	2316041060

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul "*Analisis Peran Strategis dan Posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Kontribusi, Tantangan, dan Diplomasi di Era Global*". makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akademik pada mata kuliah organisasi internasional dan globalisasi, sekaligus sebagai upaya penulis untuk mendalami dinamika administrasi publik internasional dan diplomasi multilateral yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Fokus utama dalam tulisan ini adalah bagaimana Indonesia memposisikan diri sebagai aktor kunci dalam misi perdamaian dunia, keanggotaan Dewan Keamanan PBB, hingga kepemimpinan dalam diplomasi kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan di tahun 2026. Penulis menyadari bahwa paper ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam konteks hubungan internasional.

Bandar lampung, 17 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Fondasi dan Dinamika Doktrinal	4
2.2 Teori Hubungan Internasional: Liberal Institutionalism	4
BAB III PEMBAHASAN	6
3.1. Kontribusi Indonesia dalam Misi Perdamaian (PKO): Implementasi Diplomasi Humanis dan Peran Kontingen Garuda	6
3.2. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB: Diplomasi Menjembatani Krisis dan Kepentingan Global	7
3.3. Diplomasi Kemanusiaan dan Ketahanan Nasional: Kepemimpinan di Majelis Umum PBB	8
BAB IV ANALISIS DAN TANTANGAN	9
4.1 Hambatan Diplomasi: Pengaruh Persaingan Great Powers di PBB terhadap Posisi Indonesia	9
4.2 Efektivitas Kebijakan: Dampak Keterlibatan Indonesia di PBB terhadap Kepentingan Nasional	9
BAB V PENUTUP	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah meningkatkan kompleksitas permasalahan internasional, seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan ketimpangan pembangunan antarnegara. Dalam menghadapi tantangan tersebut, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting sebagai wadah kerja sama multilateral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia (Refansa & Azhar, 2025). Peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas misi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operations*). Hingga tahun 2015, tercatat sekitar 106.536 personel penjaga perdamaian dari 125 negara terlibat dalam berbagai misi di dunia, yang tersebar di sedikitnya 16 operasi perdamaian aktif (Hutabarat, 2016). Data ini menunjukkan bahwa kontribusi negara anggota sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas global yang semakin kompleks.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki komitmen untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik internasional tanpa terikat pada kekuatan besar tertentu (Refansa & Azhar, 2025). Dalam praktiknya, Indonesia telah menunjukkan kontribusi nyata melalui partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian sejak tahun 1957 melalui pengiriman Kontingen Garuda. Hingga tahun 2016, Indonesia tercatat telah mengirimkan sekitar 2.840 personel dalam berbagai misi perdamaian PBB dan menempati peringkat ke-12 dari 124 negara kontributor pasukan perdamaian (Sanjoko, 2025). Bahkan dalam misi tertentu seperti UNIFIL di Lebanon, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kontribusi pasukan terbesar (Sanjoko, 2025).

Selain kontribusi dalam aspek keamanan, Indonesia juga aktif dalam diplomasi multilateral dan isu global lainnya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang di forum internasional, termasuk PBB (Refansa & Azhar, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai partisipan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki potensi pengaruh dalam tata kelola global.

Namun demikian, meskipun kontribusi Indonesia cukup signifikan, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, posisi Indonesia dalam struktur kekuasaan global di PBB masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara besar yang memiliki pengaruh dominan, khususnya dalam Dewan Keamanan PBB. Kedua, meskipun Indonesia aktif dalam berbagai misi internasional, belum dapat dipastikan sejauh mana kontribusi tersebut memberikan dampak nyata terhadap kepentingan nasional. Ketiga, terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dinamika politik global, serta tuntutan peningkatan kualitas diplomasi yang harus dihadapi Indonesia (Sanjoko, 2025).

Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada deskripsi kontribusi Indonesia, seperti dalam misi perdamaian atau diplomasi internasional, tanpa mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara kontribusi, posisi strategis, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam satu kerangka analisis yang utuh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan analisis mengenai peran strategis dan posisi Indonesia dalam PBB dengan mempertimbangkan kontribusi, tantangan, serta dinamika diplomasi yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam sistem internasional serta relevansinya terhadap kepentingan nasional di era global.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB?
2. Bagaimana peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam membawa isu-isu global?
3. Bagaimana kepemimpinan Indonesia dalam isu global seperti pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan lingkungan hidup?
4. Bagaimana praktik diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam forum PBB?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat posisi dan diplomasi di PBB?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
2. Mengkaji peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
3. Mengidentifikasi kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu global seperti *SDGs* dan lingkungan.
4. Menganalisis praktik diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam forum internasional.
5. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat posisi di PBB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Fondasi dan Dinamika Doktrinal

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada prinsip bebas aktif yang muncul dari konteks sejarah dekolonisasi serta dinamika global pada masa Perang Dingin. Prinsip ini pertama kali dirumuskan oleh Mohammad Hatta melalui pidatonya di BP-KNIP pada 2 September 1948 yang dikenal dengan konsep “Mendayung di Antara Dua Karang”. Dalam gagasan tersebut ditegaskan bahwa Indonesia harus menempatkan diri sebagai aktor yang mandiri dalam hubungan internasional, bukan sekadar objek dari kepentingan kekuatan besar. Makna “bebas” dalam prinsip ini merujuk pada kemampuan Indonesia untuk menentukan kebijakan luar negeri secara independen tanpa terikat pada blok atau kekuatan tertentu.

Namun, kebebasan ini tidak berarti bersikap pasif atau mengisolasi diri, melainkan tetap membuka ruang kerja sama dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan. Sementara itu, makna “aktif” mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan secara langsung dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Implementasi prinsip ini terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi dalam Gerakan Non-Blok, serta kontribusi dalam kerja sama regional di ASEAN. Dalam perkembangannya, politik bebas aktif tidak bersifat statis, melainkan mengalami penyesuaian terhadap dinamika global. Indonesia tetap mempertahankan kemandirian dalam menentukan kebijakan, namun juga mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis dalam menghadapi perubahan kekuatan dunia. Oleh karena itu, politik luar negeri bebas aktif dapat dipahami sebagai strategi yang dinamis, yang memungkinkan Indonesia tetap relevan sekaligus berdaulat dalam sistem internasional.

2.2 Teori Hubungan Internasional: Liberal Institutionalism

Untuk menganalisis keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, pendekatan Liberal Institutionalism memberikan kerangka yang tepat. Teori ini dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr., yang berpendapat bahwa kerja sama antarnegara tetap dapat terwujud meskipun sistem internasional bersifat anarki. Berbeda dengan pandangan realisme yang menekankan persaingan kekuasaan, *liberal institutionalism* melihat bahwa institusi internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerja sama. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menyediakan wadah bagi negara untuk menyusun aturan bersama, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi konflik. Melalui institusi tersebut, negara dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai perilaku negara lain sehingga ketidakpastian dapat ditekan.

Selain itu, keberadaan forum multilateral juga membantu menekan biaya diplomasi karena negara tidak perlu melakukan negosiasi secara bilateral satu per satu. Institusi internasional juga berfungsi sebagai ruang sosialisasi norma, di mana nilai-nilai global dibentuk, disebarluaskan, dan diinternalisasi oleh negara anggota. Dalam proses ini, Indonesia tidak hanya menjadi penerima norma, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembentukannya. Lebih jauh, kepatuhan terhadap aturan internasional juga berkaitan dengan upaya menjaga reputasi negara di mata dunia. Indonesia, melalui keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional, berupaya membangun citra sebagai negara yang kooperatif dan bertanggung jawab.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kontribusi Indonesia dalam Misi Perdamaian (PKO): Implementasi Diplomasi Humanis dan Peran Kontingen Garuda



Sumber: Goodstats,2025

Hingga April 2026, Indonesia telah mengukuhkan eksistensinya sebagai kekuatan utama dalam pemeliharaan perdamaian dunia, menempati peringkat ke-6 dari seluruh negara penyumbang personel PBB. Kontribusi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban internasional, melainkan bentuk nyata dari "Diplomasi Konstitusional" yang diamanatkan UUD 1945. Melalui Kontingen Garuda (KONGA), Indonesia telah mengerahkan lebih dari 1.800-2700 personel gabungan TNI dan POLRI ke berbagai misi berisiko tinggi seperti UNIFIL (Lebanon), MINUSCA (Afrika Tengah), dan MONUSCO (Kongo). Keunggulan komparatif Indonesia dalam misi PKO terletak pada strategi "*Winning Hearts and Minds*" melalui pendekatan kebudayaan. Secara administratif, personel Indonesia mengintegrasikan kegiatan operasional dengan fungsi pelayanan publik di zona konflik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, hingga pengaktifan kembali fasilitas pendidikan yang hancur. Di tahun 2026, fokus Indonesia juga bergeser pada peningkatan keterlibatan *Female Peacekeepers*. Personel perempuan Indonesia terbukti memiliki peran krusial dalam melakukan pendekatan kepada korban konflik dari kalangan wanita dan anak-anak, yang sering kali sulit dijangkau oleh personel pria. Keberhasilan ini membuat model manajemen kontingen Indonesia menjadi rujukan bagi negara lain dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) misi perdamaian yang berbasis inklusivitas dan kemanusiaan.

3.2. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB: Diplomasi Menjembatani Krisis dan Kepentingan Global

Tabel 1. Pendekatan diplomasi Indonesia dalam menghadapi terorisme global

Aspek Diplomasi	Interpretasi
Kerjasama Multilateral	Indonesia aktif dalam forum PBB, ASEAN, OKI, dan G-20 dalam memperkuat kerjasama internasional.
Kebijakan Domestik	Penanggulangan radikalisme melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga keagamaan.
Peran Pemerintah	Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen dalam memerangi terorisme dengan kebijakan luar negeri yang mendukung perdamaian.
Pendidikan dan Deradikalisasi	Indonesia mengembangkan program pendidikan perdamaian dan keberagaman untuk mencegah radikalisme.
Tantangan	Menyeimbangkan kebijakan keamanan dan hak asasi manusia, serta menangani gerakan terorisme domestik seperti ISIS dan JI.
Kerjasama dengan Negara-negara Jiran	Menguatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dalam penanggulangan terorisme.
Forum Internasional	Indonesia berperan aktif di forum G-20 dan OKI, mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian.

Sumber: Laporan Think Tank Internasional

Rekam jejak kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB mencerminkan posisi Indonesia sebagai *bridge-builder* yang mampu memediasi polarisasi antara negara-negara anggota tetap (P5) dan negara-negara berkembang. Memasuki tahun 2026, fokus utama Indonesia tetap pada isu kedaulatan Palestina dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendesak DK PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap serangan yang menargetkan pasukan perdamaian (seperti serangan terhadap UNIFIL) dan memastikan perlindungan hukum bagi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Selain isu konflik bersenjata, Indonesia membawa perspektif inovatif dalam penanggulangan terorisme global. Indonesia mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan murni (*hard approach*) menuju pendekatan komprehensif yang melibatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam sidang-sidang DK PBB, Indonesia menekankan bahwa ketidakadilan administratif dan akses ekonomi yang terbatas sering kali menjadi akar radikalisme. Dengan berbagi keberhasilan program deradikalisasi domestik di tingkat internasional, Indonesia berhasil memengaruhi perumusan resolusi-resolusi PBB agar lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, menjadikan diplomasi Indonesia lebih relevan dengan tantangan keamanan non-tradisional di era modern.

3.3. Diplomasi Kemanusiaan dan Ketahanan Nasional: Kepemimpinan di Majelis Umum PBB

Di forum Majelis Umum PBB, Indonesia telah mentransformasi pengalamannya dalam mengelola krisis menjadi instrumen diplomasi global. Pada April 2026, salah satu pencapaian administratif yang signifikan adalah kolaborasi strategis antara pemerintah Indonesia dengan PBB dalam menyusun program kerja ketahanan bencana nasional. Mengingat Indonesia berada di wilayah *Ring of Fire*, keahlian BNPB dalam manajemen risiko bencana diadopsi sebagai bagian dari implementasi Sendai Framework untuk membantu negara-negara kepulauan lainnya. Diplomasi kemanusiaan Indonesia juga mencakup aspek Ketahanan Pangan dan Kesehatan. Melalui dukungan PBB bagi petani kecil di Indonesia, pemerintah menyuarakan pentingnya akses global terhadap layanan keuangan dan penguatan kapasitas bagi produsen pangan di negara berkembang guna mencegah krisis pangan dunia. Di bidang kesehatan, Indonesia memimpin advokasi untuk kemandirian produksi vaksin dan obat-obatan, menolak praktik monopoli kesehatan yang merugikan negara-negara miskin. Kepemimpinan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengikut dalam agenda internasional, tetapi sebagai inisiator kebijakan publik global yang bertujuan untuk menciptakan sistem internasional yang lebih adil, resilien, dan inklusif.

BAB IV

ANALISIS DAN TANTANGAN

4.1 Hambatan Diplomasi: Pengaruh Persaingan Great Powers di PBB terhadap Posisi Indonesia

Persaingan antar negara besar dalam konteks internasional, terutama di dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi penghalang signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingannya. Kekuatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang mendominasi Dewan Keamanan PBB sering kali menciptakan suasana politik yang tidak seimbang, terutama karena adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Dalam situasi tersebut, Indonesia cenderung memiliki batasan dalam ruang diplomasi yang tersedia. Negara ini perlu mengimplementasikan strategi diplomasi yang cermat dan fleksibel guna menjaga prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif tanpa terikat dengan kepentingan blok tertentu. Selain itu, persaingan global juga memengaruhi agenda internasional dalam PBB, sehingga isu-isu yang penting bagi Indonesia, seperti pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan wilayah, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Meski demikian, Indonesia terus berusaha memanfaatkan forum multilateral sebagai alat untuk memperkuat posisi negosiasinya dengan membangun koalisi bersama negara-negara berkembang lainnya, contohnya melalui kerjasama dalam Gerakan Non-Blok dan G77.

4.2 Efektivitas Kebijakan: Dampak Keterlibatan Indonesia di PBB terhadap Kepentingan Nasional

Keterlibatan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa beragam keuntungan strategis, baik dari perspektif ekonomi maupun kedaulatan. Dalam aspek ekonomi, keikutsertaan aktif Indonesia di forum PBB membuka peluang yang lebih besar untuk kerjasama internasional, bantuan pembangunan, serta investasi global. Program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga PBB, seperti UNDP, turut mendukung kemajuan nasional, khususnya dalam memerangi kemiskinan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, dalam konteks kedaulatan, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian internasional di bawah PBB menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap keamanan global. Agar dapat terlibat dalam pasukan penjaga perdamaian, tidak hanya meningkatkan citra internasional, tetapi juga memperluas jaringan diplomatik negara ini.

Selanjutnya, keberadaan forum multilateral juga berkontribusi dalam mengurangi pengeluaran diplomatik, sebab negara tidak perlu menjalani negosiasi secara bilateral satu per satu. Lembaga internasional juga berperan sebagai platform untuk sosialisasi norma, di mana nilai-nilai global dibentuk, disebarluaskan, dan diinternalisasi oleh negara-negara anggotanya. Dalam proses ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemakai norma, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembentukannya. Lebih lanjut, ketaatan terhadap peraturan internasional juga terkait dengan upaya menjaga reputasi negara di kancah global. Indonesia, melalui partisipasinya dalam beragam organisasi internasional, berusaha membangun citra sebagai negara yang kooperatif dan bertanggung jawab. Walaupun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dalam kapasitas diplomatik, dinamika politik global, serta ketidakseimbangan kekuatan di tatanan internasional. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan luar negeri dan kepentingan dalam negeri guna memaksimalkan manfaat dari partisipasi di PBB.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Strategi diplomasi Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci, terutama melalui kontribusi signifikan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (PKO). Pada April 2026, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-6 sebagai negara penyumbang personel perdamaian dunia, yang mencerminkan implementasi nyata dari amanat konstitusi UUD 1945.

Selain aspek keamanan, Indonesia juga menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dalam isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), ketahanan bencana melalui *Sendai Framework*, serta diplomasi kemanusiaan yang memperjuangkan kesetaraan akses kesehatan bagi negara berkembang. Namun, posisi strategis ini tetap dihadapkan pada tantangan besar, terutama dominasi negara-negara besar (*Great Powers*) yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, yang sering kali menciptakan suasana politik tidak seimbang bagi negara berkembang. Efektivitas diplomasi Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan kepentingan nasional dengan dinamika politik global yang semakin kompleks.

5.2 Saran

Untuk memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia di PBB di masa mendatang, beberapa langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Diplomatik: Pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas negosiasi dan diplomasi delegasi agar mampu bergerak fleksibel di tengah dominasi negara-negara besar dan memaksimalkan penggunaan forum multilateral untuk kepentingan nasional.
2. Optimalisasi Peran Female Peacekeepers: Mengingat peran krusial personel perempuan dalam menjangkau korban konflik dari kalangan wanita dan anak-anak, Indonesia harus terus menambah kuota dan kualitas pelatihan bagi *Female Peacekeepers*.

3. Penguatan Koalisi Negara Berkembang: Indonesia perlu lebih aktif dalam membangun solidaritas dan posisi bersama melalui kerja sama dengan negara-negara di Gerakan Non-Blok dan G77 untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional.
4. Integrasi Kebijakan Luar dan Dalam Negeri: Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan luar negeri dan kepentingan domestik guna memastikan partisipasi di PBB memberikan manfaat nyata, baik dalam aspek ekonomi maupun penguatan kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2026). *Bappenas, PBB sepakati kerangka kerja sama pembangunan berkelanjutan 2026-2030*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/en/berita/bappenas-pbb-sepakati-kerangka-kerja-sama-pembangunan-berkelanjutan-2026-2030-pSp06>
- BNPB: Ketangguhan bangsa harus diperkuat lewat kesadaran bencana. (2025). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses pada 17 April 2026, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpb-ketangguhan-bangsa-harus-diperkuat-lewat-kesadaran-bencana>
- GoodStats. (2026). *Indonesia jadi negara penyumbang pasukan UNIFIL terbanyak*. Diakses pada 17 April 2026, dari <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-negara-penyumbang-pasukan-unifil-terbanyak-Kzqo6>
- Haryanto, A. (2014). *Prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia: Perspektif teori peran*.
- Hutabarat, L. F. (2016). *Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 6(2), 75-96.
- Hutabarat, L. F. (2016). *Diplomasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (Indonesian diplomacy in the United Nations peacekeeping missions)*. Jurnal Pertahanan, 6(2), 75–96. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/308>
- Hutabarat, L. F. (2017). *Peningkatan female peacekeepers Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB*. Jurnal BPPK Kementerian Luar Negeri RI.
- Indonesian National Police (INP). (2026). *Indonesia urges UN Security Council to probe repeated attacks on peacekeepers*. Diakses pada 17 April 2026, dari <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-urges-un-security-council-to-probe-repeated-attacks-on-peacekeepers>
- Ikenberry, G. J. (2018). *The end of liberal international order?* International Affairs, 94(1), 7–23. <https://doi.org/10.1093/ia/iix241>
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). *The promise of institutionalist theory*. International Security, 20(1), 39–51. <https://doi.org/10.2307/2539214>
- Kurniawan, F. D., et al. (2023). *Pengaruh prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia*.

- Metro TV News. (2026). *Indonesia–PBB susun program kerja 2026 fokus pada ketahanan bencana*. <https://www.metrotvnews.com/read/bD2Cworm-indonesia-pbb-susun-program-kerja-2026-fokus-pada-ketahanan-bencana>
- Paramadina, A. W. (2022). *Pengaruh kepentingan nasional dalam politik luar negeri Indonesia*. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. (2026). *Tentang PBB di Indonesia*. Diakses pada 17 April 2026, dari <https://indonesia.un.org/id/about/about-the-un>
- Purba, J. (2019). *Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian*. Jurnal Kajian Lemhannas RI.
- Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). (2026). *Kontingen Garuda*. Diakses pada 17 April 2026, dari <https://pmpp-tni.mil.id/category/kontingen-garuda/>
- Refansa, D. A., & Azhar, I. Y. (2025). *Peran Indonesia dalam Struktur Pemerintahan Internasional untuk Mewujudkan Perdamaian Global pada Abad 21*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 1357–1364. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24382>
- Sanjoko, R. (2025). *KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA*. Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, 2(1), 411-424.
- Yustitiantingtyas, L., Pratiwi, L. Y. E., & Setyowati, D. (2025, July). *Posisi Indonesia Pada Organisasi Internasional: Peran Strategis Dalam Pembentukan Hukum Internasional*. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (pp. 1-13).